

TAJUK RENCANA

Memperkuat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

PEMILU Legislatif 2024 tetap dilaksanakan menggunakan sistem proporsional terbuka (KR, 16/6). Keputusan yang melegalkan banyak orang dan menuai banyak pujian : Mahkamah Konstitusi (MK) mendengarkan suara public. MK membela demokrasi dan tentu saja pemilih tidak *membeli kucing dalam karung*.

Puas tidak puas, keputusan inilah yang terbaik. Dapat dipahami ada kelompok yang kecewa mendengar keputusan dalam persidangan perkara nomer 114/PPU-XX/2022. Namun palu telah diketuk. Dan harus diakui, putusan ini cukup mendinginkan suasana debat jelang pemilu. Apalagi sempat menaikkan derajat panas ketika muncul pengakuan Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011-2014) Denny Indrayana yang menyatakan mendapat bocoran bila sistem pemilu akan kembali menjadi proporsional tertutup.

Dalil pemohon bila penyelenggaraan pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik, dinilai sesuatu yang berlebihan. Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra sesuai ketentuan pasal 22E ayat (3) UUD 1945, menempatkan parpol sebagai peserta pemilu legislatif dalam batas penalaran yang wajar. Parpol bahkan menurut Saldi masih memiliki peran sentral. Selain memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon.

Yang menarik dan paling penting, argumentasi komprehensif MK membantah dalil pemohon yang intinya menyatakan sistem proporsional dengan daftar terbuka sebagaimana ditentukan dalam norma pasal 168 ayat (2) UU Pemilu bertentangan UUD, adalah tidak beralasan. MK jelas menegaskan bila Konstitusi Indonesia tidak pernah mengatur sistem pemilihan legislatif. Pasal 22 E ayat (3) UUD yang berbunyi *peserta pemilihan umum untuk angara DPR dan DPRD adalah partai politik* tidaklah sertamerta diartikan sebagai sistem proporsional tertutup, hanya memilih partai politik. Meski Konstitusi tidak mengatur jenis sistem pemilu namun MK berkesimpulan, sis-

tem proporsional daftar calon terbuka lebih dekat dengan keinginan Konstitusi.

Karena sistem pemilu adalah wewenang pembuat undang-undang, MK pun selalu mengungkap solusi dalam menghadapi kelemahan-kelemahan yang diajukan pemohon. Maka demi pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas, gagasan MK tampaknya perlu mendapat perhatian. Pelaksanaan UU Pemilu harus dievaluasi. Tinggal bagaimana kemauan politik dari partai politik (karena Anggota DPR adalah hasil pilihan parpol) juga pemerintah untuk mengevaluasi UU Pemilu. Agar celah yang bisa menjadi penanda kelemahan sistem proporsional terbuka, bisa diperbaiki.

Dalam sistem proporsional terbuka, sosok caleg sangat menentukan peroleh suara. Karena itulah partai berlomba memasang nama populer penyanyi, artis film/sinetron, seniman dan lainnya. Tapi kepopuleran saja sejatinya tidak cukup, tanpa dukungan pengetahuan, ideologi, kualitas serta gizi yang dalam bahasa Cak Nur disebut : 'isi tas'. Hanya mengandalkan kepopuleran di tengah pemilih makin kritis, 'tontonan' di Senayan kian menjemukan.

Tidak bisa dinafikan. Senayan kini tidak lagi sekadar tempat para politisi beradu argumentasi, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Namun juga telah menjadi 'panggung' dengan banyaknya artis penyanyi dan film yang tampil di Gedung DPR selama ini. Kepopuleran namanya membuatnya mudah melenggang dan duduk di kursi empuk. Mirisnya, suara vocal mereka kurang terdengar dan aktungnya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat kurang terlihat di layar kaca ataupun media.

Jika ini dianggap kelemahan, perbaiki dengan rekrutmen calon legislatif. Lakukan upaya memperkuat sistem proporsional terbuka dengan pendidikan politik. Pendidikan yang tidak instan, yang bukan hanya sejenak menjelang pemilu. Namun perlu pendidikan politik bertahap, kontinyu dan berkelanjutan. □-f

Wisuda Oh.. Wisuda

Sudaryanto

anaknya.

Penulis berpendapat, seyogyanya Kemendikbudristek segera membuat regulasi/aturan wisuda di jenjang TK sampai SMA. Lewat regulasi itu, ditegaskan bahwa kegiatan wisuda bersifat opsional atau pilihan bagi pihak TK hingga SMA. Jika pihak TK hingga SMA ingin mengadakan wisuda siswa, hal itu harus seizin dari pihak komite



KR-JOKO SANTOSO

Persetujuan

Apabila pendapat Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek yang kita rujuk, wisuda siswa TK sampai SMA bersifat opsional atau pilihan. Pihak TK - SMA dapat melaksanakan wisuda atau tidak setelah mendapatkan persetujuan dari pihak orangtua/wali. Terkait itu, perwakilan orangtua/wali dalam komite sekolah harus proaktif dan angkat suara soal biaya wisuda siswa yang memberatkan sebagian (besar) orangtua.

Sebagai contoh, satu keluarga memiliki dua anak yang bersekolah di kelas VI SD dan IX SMP. Kedua anak itu sama-sama wajib ikut wisuda di sekolahnya. Biaya wisuda di dua jenjang itu pastinya mahal. Akibatnya, beban ekonomi orangtua bertambah. Mau tidak mau, bisa jadi orangtua harus berutang demi membayar biaya wisuda

sekolah dan/atau orangtua/wali. Jika tidak ingin mengadakan wisuda siswa, hal itu dapat dicari solusi selanjutnya.

Misalnya, para siswa TK hingga SMA cukup diminta hadir ke sekolah, berpakaian rapi, dan didampingi orangtua/wali untuk menerima ijazah dan bukti kelulusan. Pihak guru/wali kelas selaku perwakilan sekolah dapat menyampaikan pesan kepada siswa dan orang tuanya. Biaya wisuda dapat dialihkan untuk biaya pendidikan di jenjang berikutnya.

Selain tentang kegiatan wisuda di

Tindak Tegas Pelaku Pencabulan di Sekolah

Ridwan Mahendra

"Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu." -Ki Hajar Dewantara-

SUDAHKAH ranah pendidikan kita menerapkan semboyan yang digambarkan Bapak Pendidikan Nasional tersebut? Nampaknya pendidikan kita terus terombang-ambing dengan adanya oknum pendidik (guru) yang semakin hari semakin meruntuhkan muara seorang pendidik.

Terbaru, bukannya mendidik dan mengayomi. Dua oknum pendidik madrasah di Kecamatan Baturetno Wonogiri ini malah tega mencabuli siswanya sendiri. Dua pelaku pencabulan murid madrasah yakni M (47) oknum kepala sekolah (Kasek) dan guru Y (51), akhirnya dijebloskan ke sel tahanan Polres Wonogiri. Demikian artikel yang tayang pada Harian KR edisi Sabtu (3/6/2023) dengan judul 'Oknum Kepala Sekolah dan Guru Madrasah Pelaku Pencabulan 12 Siswi Akhirnya Ditahan'.

Ironis. Pendidik, dapat dikatakan sebagai salah satu ujung tombak suksesnya generasi di masa mendatang. Berdasarkan catatan Kemen-PPPA, kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mencapai 9.558 kasus pada 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan drastis pada tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.162 kasus.

Banyaknya kasus demi kasus yang dilakukan oknum pendidik, tentu menjadi perhatian khusus bagi pemangku kebijakan. Mengingat sekolah merupakan tempat menimba ilmu, tanpa mengesampingkan tata laku dan kode etik yang berlaku. Seyogianya muara guru merupakan sumber ilmu yang semestinya mendidik siswanya dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta

bekal yang berlandaskan dengan budi pekerti yang luhur.

Guru merupakan seorang yang dapat dijadikan pedoman bagi siswa-siswinya. Pedoman yang baik dan menjadikan anak didiknya sebagai seseorang yang berhasil. Guru yang memimpin tentu mengerti akan kode etik seorang pendidik, cara berpikir, sikap mental, dan terpenting perilakunya yang tercermin baik di dalam maupun di luar sekolah.

Ditambah Sepertiga

Menilik laman Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPS-DM) Kemendikbudristek Republik Indonesia, secara khusus dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp5 miliar. Jauh lebih dari itu, apabila pendidik yang melakukan tindakan pencabulan terhadap siswanya, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Merujuk pada hal tersebut, sudah sepatutnya seorang pendidik yang melakukan tindak pencabulan terhadap anak didiknya mendapat 'ganjaran' setimpal. Tidak bisa dianggap remeh, namun sangat tidak bermoral, dan mencoreng citra pendidikan di Indonesia. Dan dampaknya bagi korban bisa mulai dari depresi, trauma, gangguan kesehatan, dan lain

jenjang TK sampai SMA, Kemendikbudristek juga perlu membuat regulasi tentang kegiatan *study tour* atau karyawisata. Banyak orangtua merasa biayanya mahal dan memberatkan. Kegiatan ini juga rentan dengan aksi pungutan liar/pungli. Kepala sekolah dan guru sering menjadi kambing hitam atas pungli kegiatan *study tour* atau karyawisata.

Berbela Rasa

Kembali ke soal wisuda. Di jenjang TK, kegiatan wisuda dapat diarahkan ke pengembangan bakat, minat, dan kreasi anak usia dini. Misalnya, pentas tari, menyanyi, hafalan Quran, hafalan doa dan lainnya. Potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik anak usia dini diajarkan dan ditampilkan pada kegiatan wisuda. Dengan begitu, guru dan orangtua siswa TK dapat memaknai bahwa anaknya sudah berkembang optimal.

Di jenjang SD, SMP, dan SMA, kegiatan wisuda tidak harus mahal dan di hotel. Pihak sekolah dapat mendorong siswanya untuk berbela rasa di panti asuhan, panti jompo, rumah singgah anak jalanan. Atau, berbela rasa dengan membersihkan sampah di pantai, selokan dan lainnya. Kegiatan wisuda siswa bermuatan bela rasa itu sederhana tapi bermakna. □-f

** Sudaryanto MPd, Dosen PBSI FKIP UAD; Mahasiswa S-3 Ilmu Pendidikan Bahasa UNY*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

sebagainya. Tidak ada satu insan pun yang berhak mendapat perlakuan pencabulan di semua ranah, termasuk di lingkup sekolah. Korban adalah insan yang paling dirugikan dan tak perlu takut untuk berbicara terhadap orang-orang terdekatnya, orangtua utamanya. Korban berhak bersuara atas apa yang dialaminya. Bahkan dengan dampingan orangtua untuk segera melapor terhadap lembaga-lembaga yang berkompeten menanganinya. Ada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian PPPA dan lainnya.

Guru, *digugu lan ditiru*. Dan munculnya beberapa kasus pencabulan yang dilakukan guru di sekolah, harus diakui merupakan tamparan keras bagi pendidikan di Indonesia. □-f

** Ridwan Mahendra SPd, Guru Bahasa Indonesia di SMK Sejahtera Mandala Bhakti Surakarta.*

Pojok KR

ASEAN perlu perkuat kerja sama rehabilitasi pecandu narkoba.

-- Kerja sama tanggulangi peredaran juga.

Diterima PPPK dan Perdes, Panwas-cam Undurkan Diri.

-- Wah ada 'lowongan' Panwas-cam .

Amunisi aktif ditemukan di pekarangan.

-- Hebat, puluhan tahun tertimbun masih aktif.

Beraba

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 5523. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Pengamen di Malioboro

MALIOBORO itu tidak akan pernah habis diceritakan. Kini, pedagang kakilima disatukan di teras Malioboro, jalan-jalan di kawasan itu super menyenangkan. Apalagi di sore hari kita bisa nongkrong di sepanjang jalur yang penuh kisah dan melegenda tersebut. Pokoknya, nongkrong sore di Malioboro pasti ada sejumlah cerita. Tak heran bila sore hari bisa dikatakan tidak ada tempat duduk yang kosong di sepanjang jalan tersebut.

Namun kenikmatan itu kadangkala terganggu dengan kedatangan pengamen yang seakan tidak berhenti. Mereka menghampiri, menyanyi dan kemudian me-

minta uang. Bener, ini sangat mengganggu. Apalagi mereka datang berbondong-bondong, artinya ngamen rombongan. Dan kalau satu dikasih, akan terus hadir rombongan yang lain.

Mungkin ini kurang diantisipasi. Penertiban selama ini focus menata pedagang. Ketika pedagang sudah tertib, kawasan tertata eh diganggu pengamen. Mohon mendapat perhatian, agar kenyamanan di Malioboro bisa mengesankan terlebih bagi warga dari luar Kota Yogya. Malioboro itu terkenal dan melegenda. Maka, beberapa kota 'bikin' Malioboro juga. □-f

Wahyu MM, Baciro Kota Yogya

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklikankryk23@yahoo.com, iklikankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP